



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEBRINA WIDIANTI
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 260800

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 10.450.000.000

1. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 251 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 246 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 580.000.000

1. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
115.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VOXY MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 395.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 120.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.448.113.995**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 14.598.113.995



III. HUTANG

Rp. 440.759.116

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 14.157.354.879

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.